



COST-PUSH INFLATION DAN KEBIJAKAN MONETER SYARIAH: IMPLIKASI BAGI EKONOMI INDONESIA

Ilham Khoirurrozikin

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Ainur Aisyah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Bray Nero Valerian

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Kevin Dwi Ramadhani

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Amalia Nuril Hidayati

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: ilhamkhoirurrozikin26@gmail.com

Abstrak: *This study aims to explain the concept of cost-push inflation, understand the principles of Islamic monetary policy, and analyze its effectiveness in addressing inflationary pressures. This study employed library research with a qualitative approach, drawing on journals, books, and contemporary Islamic economics and macroeconomic literature. The results indicate that Islamic monetary policy has the potential to be more adaptive to cost-push inflationary pressures because it rejects speculative practices and bases economic activity on a stable and productive value basis. Consequently, this policy not only has the potential to suppress cost-push inflation but also supports price stability, strengthens the resilience of the real sector, and safeguards long-term public welfare.*

Keywords: *Cost-Push Inflation, Indonesian Economy, Price Stability, Sharia Monetary Policy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *cost-push inflation*, memahami prinsip kebijakan moneter syariah, serta menganalisis efektivitasnya dalam menghadapi tekanan inflasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari jurnal, buku, dan literatur ekonomi syariah maupun makroekonomi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah berpotensi lebih adaptif terhadap tekanan inflasi biaya karena menolak praktik spekulatif serta menempatkan aktivitas ekonomi pada landasan nilai yang stabil dan produktif. Implikasinya, kebijakan ini tidak hanya berpotensi menekan *cost-push inflation*, tetapi juga mendukung stabilitas harga, memperkuat ketahanan sektor riil, dan menjaga kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Inflasi dorongan Biaya, Ekonomi Indonesia, Stabilitas Harga, Kebijakan Moneter Syariah.*

PENDAHULUAN

Kenaikan harga kebutuhan pokok secara terus menerus berpengaruh terhadap kemampuan konsumsi masyarakat dan menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Fenomena tersebut menjadi sinyal adanya tekanan inflasi dalam perekonomian nasional. (Garba, 2023) Salah satu penyebab dasar terjadinya inflasi adalah adanya ketidakseimbangan ketika permintaan agregat dalam perekonomian melebihi kemampuan penawaran agregat untuk memenuhinya. Dalam konteks Indonesia, inflasi yang terlalu tinggi perlu dicegah agar stabilitas pembangunan tetap terjaga dan iklim usaha dapat terus berkembang dengan baik.

Salah satu bentuk inflasi yang memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan perekonomian adalah inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*). Inflasi dorongan biaya timbul akibat kenaikan biaya produksi, seperti bahan baku, energi, atau upah, yang pada akhirnya meningkatkan harga barang dan jasa secara umum. Kenaikan biaya tersebut membuat produsen harus memutuskan apakah ingin mengurangi barang yang diproduksi atau meningkatkan harga jualnya. Akibatnya, output nasional atau PDB riil cenderung menurun, sementara tingkat pengangguran meningkat. Situasi ini menimbulkan dilema bagi pembuat kebijakan, karena langkah untuk menekan inflasi sering berpotensi memperburuk pengangguran, sementara upaya mengurangi pengangguran dapat menyebabkan inflasi kembali meningkat.

Tingkat stabilitas ekonomi di dalam negeri bisa dicapai dengan menjaga kondisi sektor keuangan agar tetap sehat. Mengendalikan kenaikan harga barang (inflasi) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (PDB) adalah tujuan utama dari kebijakan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekonomi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk mengatur dan mengontrol kedua hal tersebut. (Rahmad Riho Zeen dkk., 2022) Oleh karena itu, ketika inflasi dorongan biaya terjadi, menjaga kestabilan harga menjadi semakin menantang akibat adanya gangguan pada struktur biaya produksi yang sebenarnya. Melihat kelemahan tersebut, kebijakan moneter berbasis syariah muncul sebagai opsi alternatif yang dianggap lebih stabil dan memiliki hubungan yang erat dengan sektor riil perekonomian.

Urgensi penelitian mengenai efektivitas moneter syariah dalam menghadapi *cost-push inflation* semakin relevan seiring meningkatnya tantangan produksi di Indonesia seperti kenaikan harga energi global, ketergantungan impor bahan baku, serta fluktuasi nilai tukar. Jika kebijakan moneter syariah terbukti efektif, maka kontribusinya tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat sektor riil melalui mekanisme pembiayaan produktif. Pendekatan ini sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja dan distribusi kekayaan yang lebih merata. (Arjuna dkk., 2024) Oleh karena itu, penelitian ini diupayakan untuk menganalisis hubungan antara kedua konsep tersebut serta mengkaji potensi kontribusi kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas perekonomian Indonesia di masa depan.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Inflasi

Inflasi adalah kondisi yang menggambarkan sebuah situasi ketika harga barang dan jasa meningkat secara terus menerus dan berkala dalam periode tertentu pada suatu perekonomian. Kenaikan harga belum bisa dikatakan inflasi jika hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Pengukuran inflasi dapat dilakukan dengan cara menghitung rata-rata sebuah perubahan kenaikan harga barang dengan kenaikan harga jasa selama periode tertentu, (Devia SS & Fadli, 2023) Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah alat ukur umum untuk menghitung inflasi yang merefleksikan perubahan pada harga rata-rata terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pihak rumah tangga. Menjaga inflasi tetap stabil sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena tingkat Inflasi yang terlalu tinggi bisa bikin masyarakat jadi kurang bisa membeli barang, dan juga membuat situasi jadi tidak pasti dalam aktivitas pasar.

Penyebab Inflasi

Inflasi kerap jadi perhatian banyak orang atau masyarakat, terutama ketika perubahan harga mulai terasa di berbagai kebutuhan. Berikut adalah beberapa penyebab dari adanya inflasi:

- 1) Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation): Terjadi ketika kondisi permintaan agregat pada ekonomi melebihi penawaran yang tersedia. Peningkatan konsumsi,

pertumbuhan ekonomi yang cepat, kebijakan moneter yang longgar, ekspektasi inflasi, dan peningkatan ekspor dapat memicu jenis inflasi ini.

- 2) Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation): Disebabkan oleh meningkatnya anggaran produksi, seperti adanya kenaikan harga bahan baku, upah, maupun depresiasi nilai tukar. Kenaikan biaya ini mendorong produsen untuk menaikkan harga jual.
- 3) Ekspektasi Inflasi: Ekspektasi kenaikan harga di masa depan dapat mendorong konsumen dan produsen untuk menaikkan harga, sehingga memicu inflasi. Masyarakat cenderung mengalihkan aset finansial menjadi aset riil seperti tanah dan rumah. (Rezeki & Mahalli, 2014)

Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa hal:

- 1) Dari tingkat keparahannya, ada inflasi ringan dimana apabila kenaikannya kurang dari 10% setahun, inflasi sedang apabila antara 10 sampai 30%, inflasi berat apabila sampai 100%, dan apabila lebih dari 100% disebut hiperinflasi.
- 2) Dari sumbernya, inflasi ada yang berasal dari dalam negeri dan ada juga yang dibawa dari luar negeri.
- 3) Dari penyebabnya, ada inflasi yang terjadi karena permintaan yang tinggi (demand-pull), kenaikan biaya produksi (cost-push), dan gangguan pasokan (bottle neck). (Agustin dkk., 2025)

kebijakan Moneter Syariah

Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan moneter secara umum atau konvensional merupakan tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi kestabilan ekonomi dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. (Naf'an, 2014) Sedangkan kebijakan moneter secara syariah hampir sama dengan kebijakan moneter secara konvensional yaitu langkah yang diambil pemerintah, melalui bank sentral, untuk mengatur dan mengarahkan kondisi ekonomi makro agar lebih stabil dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. (Dini Abdianti dkk., 2023)

Menurut M. Umer Chapra, kebijakan moneter syariah berbeda adanya dengan kebijakan moneter secara konvensional, terutama pada hal pemilihan target beserta instrumen yang digunakannya. Menurutnya, sistem moneter Islam berbeda karena tidak mempergunakan sistem bunga sebagai acuan nilai maupun instrumen kebijakan sehingga aktivitas keuangan harus terbebas dari riba. (Gultom, 2014) Dalam perspektif Islam, kebijakan moneter wajib terbebas dari praktik riba dan bunga, karena keduanya dilarang secara tegas dalam ajaran syariah atau Islam. Oleh sebab itu, instrumen berbasis bunga yang biasanya menjadi alat utama pengaturan moneter pada sistem ekonomi secara umum atau konvensional tidak digunakan dalam sistem ekonomi Islam. (Syalsabila dkk., 2025)

Tujuan kebijakan moneter Islam

Chapra menekankan bahwa tujuan dari kebijakan moneter Islam “harus mengarahkan perekonomian pada penciptaan lapangan kerja, pemerataan distribusi kekayaan, serta kestabilan nilai mata uang melalui sistem yang terhindar dari praktik riba.” (Muljawan dkk., 2020) Selain itu, kebijakan moneter Islam juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan deflasi melalui instrumen yang sesuai syariah. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi yang bebas dari riba dan spekulasi. Di sisi lain, pemerataan kesejahteraan diperkuat melalui pemanfaatan zakat dan infak untuk mengurangi ketimpangan. Stabilitas sistem keuangan pun dijaga dengan memastikan lembaga keuangan beroperasi sesuai prinsip syariah dan terhindar dari praktik yang dilarang. (Muljawan dkk., 2020)

METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penelitian ini, pengumpulan data ataupun materi pembahasan dilaksanakan dengan cara penelaahan berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik kajian, lalu menjelaskannya secara mendetail berdasarkan kualitas informasi yang didapat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual terhadap teori-teori ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan cost-push inflation dan kebijakan moneter syariah, bukan melalui pengumpulan data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini, sumber informasinya diambil dari berbagai tulisan, termasuk artikel ilmiah, buku, Selain itu, dianalisis pula sejumlah laporan penelitian lain yang dianggap relevan dengan topik inflasi, kebijakan moneter, serta ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data ataupun materi dilakukan metode studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan hasil kajian dari berbagai sumber pustaka yang mendukung topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cost-Push Inflation (Inflasi Biaya Dorongan)

Cost-push inflation terjadi apabila biaya produksi mengalami kenaikan, lalu perusahaan mau tidak mau harus menaikkan harga jual untuk menutup biaya tersebut. Dalam gambaran ekonomi secara umum, kondisi ini membuat jumlah barang dan jasa yang ditawarkan berkurang, sehingga harga-harga naik sementara produksi justru menurun. Sehingga, hal ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat (*Aggregate Supply*) ke kiri, sehingga tingkat harga umum meningkat sementara output menurun. (TetiK & Bari, 2022)

Okon E. A., Eke A. F. and Morgan M. O menyatakan bahwa *cost-push inflation* muncul bukan karena tekanan permintaan, tetapi karena kenaikan biaya dari sisi penawaran. (E.A. dkk., 2023) Berbagai hal seperti naiknya biaya impor bahan baku, meningkatnya beban pajak, serta terganggunya alur distribusi barang di tingkat global turut mempercepat munculnya inflasi jenis ini. Di negara berkembang, dampaknya biasanya lebih terasa karena ketergantungan yang tinggi pada impor dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Berikut Penyebab beserta penjelasan dari inflasi tersebut (*Cost Push Inflation*):

1. Tekanan upah: Inflasi biaya-dorongan sering kali dikaitkan dengan kenaikan upah atau peningkatan margin keuntungan. Tekanan upah terjadi ketika serikat pekerja dan karyawan berhasil mendapatkan kenaikan gaji yang meningkat lebih cepat dibandingkan produktivitas mereka. Banyak yang berpendapat bahwa kekuatan serikat pekerja dapat memicu inflasi, karena tuntutan upah yang terus naik membuat biaya produksi ikut bertambah. Dalam situasi seperti itu, perusahaan biasanya menaikkan harga barang atau jasa untuk menutup biaya tambahan, sehingga inflasi ikut terdorong.
2. Kenaikan Harga karena Margin Laba: Secara sederhana, perusahaan biasanya menetapkan harga dengan menambahkan margin keuntungan di atas biaya bahan baku dan tenaga kerja. Dalam sistem seperti ini, jika biaya produksi naik atau perusahaan memutuskan menambah margin keuntungannya bahkan jika kedua hal itu terjadi sekaligus maka harga jual pun akan ikut naik. Singkatnya, ketika biaya atau margin keuntungan meningkat, perusahaan cenderung menyesuaikan harga, dan hal ini mendorong naiknya harga-harga secara umum.
3. Pengaruh kenaikan Harga Impor: Barang impor memiliki peran besar dalam memicu inflasi, sehingga kenaikan harga di satu negara dapat dengan mudahnya menyebar luas ke negara lainnya. Lonjakan harga komoditas dunia terutama minyak pada tahun 1970-an jelas menjadi salah satu penyebab meningkatnya inflasi di banyak negara. Inflasi semacam ini merupakan

fenomena global yang sulit dihindari. Suatu negara hampir tidak mungkin benar-benar memisahkan diri dari dampak kenaikan harga internasional.(Wibowo, 2020)

Cost-push inflation adalah inflasi yang muncul ketika biaya untuk memproduksi barang dan jasa naik, sehingga perusahaan mau tidak mau ikut menaikkan harga jual. Inflasi jenis ini terjadi karena tekanan dari sisi biaya, bukan karena permintaan masyarakat yang meningkat. Beberapa penyebabnya antara lain kenaikan upah yang tidak diimbangi oleh produktivitas, perusahaan menambah margin keuntungan karena biaya makin mahal atau karena mereka memprediksi harga akan naik di masa depan, serta naiknya harga impor khususnya bahan baku dan komoditas dari luar negeri. Kondisi seperti ini membuat harga-harga umum naik sementara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan justru menurun. Selain itu, karena negara saling terhubung lewat perdagangan, inflasi jenis ini bisa lebih cepat menyebar dari negara yang satu ke negara lainnya.

Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Syariah dalam Mengatasi Cost-Push Inflation

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, instrumen kebijakan moneter syariah terbukti memiliki efektivitas yang signifikan dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Dua instrumen utama yang sering direalisasikan adalah Sukuk Bank Indonesia Syariah (SBSI) dan Dana Pihak Bersih Syariah (DPB), keduanya telah terbukti efektif dalam menekan tingkat inflasi.(R. Sari & A.Y, 2024)

SBSI adalah instrumen utang syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Mekanisme SBSI melibatkan penjualan obligasi syariah kepada investor, dimana dana yang terkumpul digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas di pasar. Ini membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan mempromosikan keadilan ekonomi.(Sudarsono, 2017)

Selain itu, DPB adalah instrumen yang mendukung perekonomian riil dengan cara memberikan insentif bagi bank syariah untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor produktif untuk membantu menambah dana atau biaya produksi sehingga dapat menjaga kelancaran rantai pasok dan mencegah biaya produksi naik secara berlebihan. DPB dapat meningkatkan kredit yang tersedia untuk bisnis kecil dan menengah serta proyek-proyek infrastruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Dibandingkan dengan instrumen moneter konvensional, instrumen moneter syariah menawarkan beberapa keunggulan. Salah satunya adalah penggunaan mekanisme yang lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi ekonomi. Instrumen syariah juga cenderung lebih berorientasi pada pengurangan tekanan inflasi dari sisi permintaan melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi riil. (Nasution & Batubara, 2023)

Keberhasilan kebijakan moneter syariah ketika mengendalikan inflasi yang ada di Indonesia, juga sangat tergantung pada beberapa faktor pendukung. Komitmen yang kuat dari Bank Indonesia dan otoritas terkait dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci utama. Selain itu, tingkat literasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan dukungan infrastruktur keuangan syariah yang memadai juga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan ini.(Ilmi dkk., 2024)

Untuk membuat kebijakan moneter syariah supaya berjalan lebih efektif, masyarakat perlu lebih banyak diperkenalkan pada konsep ekonomi syariah melalui berbagai kegiatan edukasi seperti seminar, workshop, atau program pembelajaran lainnya. Selain itu, produk dan layanan keuangan syariah perlu terus dikembangkan secara kreatif agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat saat ini. Infrastruktur yang mendukung sistem keuangan syariah

juga harus diperkuat supaya penerapan kebijakan bisa berjalan lebih lancar. Di sisi lain, kerja sama antara Bank Indonesia, lembaga terkait, dan para pelaku industri keuangan syariah juga perlu diperbaiki agar seluruh pihak dapat bergerak sejalan dalam upaya mengendalikan inflasi dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. (Syafitri dkk., 2024)

Implikasi kebijakan Moneter Syariah bagi ekonomi Indonesia

Penerapan kebijakan moneter syariah di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi dan fluktuasi pasar. Dengan pendekatan yang berfokus pada sektor riil dan prinsip-prinsip keuangan yang adil, kebijakan ini tidak hanya memengaruhi pergerakan harga dan likuiditas, tetapi juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta pengembangan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan. Dari sisi implikasinya terhadap perekonomian Indonesia, kebijakan moneter syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan moneter secara konvensional ialah sebagai berikut:

1. Menjaga kestabilan Inflasi dalam pandangan syariah: Dalam ekonomi konvensional, suku bunga biasanya menjadi alat utama untuk mengendalikan inflasi. Namun, pada ekonomi secara Islam, suku bunga tidak dapat diterapkan karena termasuk riba, yang dilarang oleh agama Islam. Sebagai gantinya, ekonomi secara Islam menjaga stabilitas inflasi dengan menggunakan cara-cara lain, antara lain melalui mekanisme berikut:
 - a. Pengendalian Peredaran Jumlah Uang: Bank Indonesia Syariah dapat menekan inflasi dengan mengatur peredaran uang melalui instrumen berbasis aset riil, seperti sukuk. Melalui mekanisme ini, penambahan jumlah uang yang beredar selalu didasarkan pada dukungan aset riil, yang secara efektif meminimalkan bahaya inflasi yang telah disebabkan karena adanya kelebihan dari likuiditas.
 - b. Pemanfaatan zakat serta Wakaf Produktif: Instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kekayaan. Pemanfaatan dana sosial ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meminimalisir terjadinya ketimpangan, dan turut membantu menjaga kestabilan harga di pasar.
2. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: Melalui akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama investasi antara dua pihak), ekonomi Islam menekankan pentingnya investasi yang hasilnya dibagi sesuai keuntungan atau kerugian.
 - a. Dampak terhadap Investasi: Melalui mekanisme sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil serta bisa menyesuaikan dibandingkan dengan adanya bunga yang tidak berubah atau tetap, kebijakan uang syariah ini bisa membantu mengarahkan investasi lebih banyak ke usaha nyata. Sistem ini juga membuka dan mendorong UMKM untuk bisa lebih berkembang, mengingat mereka menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Pendekatan ini membantu menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan stabil.
 - b. Penciptaan Lapangan Kerja: Dengan fokus penyaluran dana pada aktivitas produktif, kebijakan moneter syariah turut memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor. Larangan terhadap aktivitas spekulatif membuat dana lebih banyak mengalir ke kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa nyata, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak hanya menambah lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.
3. Menjaga Nilai Tukar & Keuangan Negara (Neraca Pembayaran): Ekonomi Islam membantu menjaga agar nilai tukar mata uang stabil dan neraca pembayaran negara seimbang dengan

ekonomi Islam. Untuk menjaga nilai tukar supaya tetap stabil dengan cara melarang aktivitas yang berspekulasi pada pasar mata uang asing serta mendorong transaksi yang berdasarkan benda nyata. Berikut kebijakan moneter secara syariah mencakup:

- a. Meminimalkan fluktuasi Nilai Tukar : Dengan menghindari adanya spekulasi dan memastikan bahwa setiap transaksi berlandaskan pada pertukaran barang dan jasa nyata, adanya fluktuasi nilai tukar akibat aktivitas tidak produktif sehingga dapat ditekan. Hal ini membantu menjaga kestabilan nilai tukar dan mendukung kelancaran hubungan dagang Indonesia dengan negara lain.
 - b. Mendorong peningkatan kompetivitas Ekspor : Stabilitas sistem keuangan syariah serta nilai tukar yang lebih terkendali dapat menjadikan produk ekspor yang dimiliki oleh Indonesia lebih kompetitif di tingkat global. Dengan nilai tukar yang stabil, biaya produksi dan harga jual ekspor menjadi lebih terprediksi, sehingga pelaku usaha dapat merencanakan produksi dan pemasaran dengan lebih efisien. Ini pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekspor nasional.
4. Meminimalisir risiko terjadinya krisis keuangan: Kebijakan moneter syariah dinilai mampu meminimalkan risiko krisis keuangan, sebab sistem keuangan Islam membatasi praktik yang bersifat spekulatif dan mewajibkan transaksi didukung oleh aset nyata, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga:
- a. Berbasis Aset Riil : Prinsip ekonomi syariah mengharuskan semua transaksi didukung oleh aset riil, menjadikannya lebih tahan terhadap gelembung spekulatif suatu kelemahan yang sering ditemukan dalam sistem konvensional yang kurang berorientasi pada aset nyata. Pendekatan ini membantu menekan risiko spekulasi berlebihan dan menciptakan stabilitas yang lebih kuat dalam perekonomian.
 - b. Keterbatasan Utang Berbasis Bunga : Dalam ekonomi Islam, pengelolaan utang dilakukan dengan aturan yang lebih ketat karena bunga tidak diperbolehkan. Aturan ini membuat risiko gagal bayar cenderung lebih kecil, yang biasanya menjadi salah satu pemicu besar krisis dalam sistem keuangan biasa. Karena itu, keuangan syariah dianggap mampu menawarkan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan. (Arjuna dkk., 2024)

Kebijakan moneter syariah memiliki implikasi positif bagi perekonomian Indonesia, antara lain menjaga stabilitas inflasi melalui pengendalian uang beredar dan distribusi zakat, mendorong perkembangan ekonomi yang terus berjalan dengan cara melakukan investasi yang fokus pada sesuatu yang spesifik. bagi hasil, menjaga stabilitas nilai tukar dan daya saing ekspor, serta mengurangi terjadinya risiko krisis keuangan dengan sistem berbasis aset riil dan keterbatasan utang berbunga. Secara keseluruhan, pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan kebijakan moneter konvensional.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa cost-push inflation muncul karena adanya peningkatan oleh biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, upah, energi, dan biaya impor. Kenaikan biaya tersebut menggeser kurva penawaran agregat ke kiri sehingga harga meningkat namun output menurun, dan tekanan inflasi dapat menyebar antar-negara melalui perdagangan internasional. Inflasi ini bersumber dari sisi penawaran, bukan akibat tingginya permintaan, sehingga penanganannya lebih kompleks karena terkait struktur biaya dan produktivitas ekonomi. Kebijakan moneter syariah efektif meredam inflasi melalui instrumen

berbasis aset riil seperti SBSI dan DPB untuk menghambat kenaikan harga biaya produksi. Dengan prinsip tanpa riba dan anti-spekulasi, kebijakan ini lebih stabil dalam menghadapi inflasi biaya. Bagi Indonesia, pendekatan ini menjaga stabilitas harga, mendorong sektor riil dan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, serta menekan risiko krisis. Secara keseluruhan, moneter syariah menjadi alternatif yang kuat untuk menghadapi cost-push inflation dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Clarissa, M., Nelo, Y., & Lawalu, E. M. (2025). Pengaruh Kenaikan Inflasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Kupang serta Implikasinya terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 791–796.
- Arjuna, Michael Schumacher, Sukma Kartika, & Anas Malik. (2024). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 25–47. <https://doi.org/10.52655/khg.v8i1.105>
- Devia SS, V., & Fadli, F. (2023). *Mendalami Korelasi Pasar Saham, Inflasi dan Nilai Tukar Uang*. UB Press. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=LPjvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=ebook+tentang+inflasi&ots=pAXv_PagDF&sig=WAG87aGY-XOk5iamRC2-r iY_Uck
- Dini Abdianti, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi, & Faisal Hidayat. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 213–226. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1140>
- E.A., O., A.F., E., & M.O., M. (2023). Inflation Theory: A Theoretical Review of Demand-Pull and Cost-Push Inflation Effect on Nigeria Economy. *African Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(3), 34–41. <https://doi.org/10.52589/AJESD-HBKHJP39>
- Garba, A. M. (2023). The asymmetry effect of budget deficit and inflation in Nigeria. *Journal of Global Economics and Business*, 4(13), 97–110. <https://doi.org/10.58934/jgeb.v4i13.143>
- Gultom, M. S. (2014). *Analisis Kebijakan Moneter Islam M.Umer Chapra* [Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara]. https://sg.docs.wps.com/module/common/aiGuide/?sid=sIJ-JxpCOAc_LxsgG#1762765148846
- Ilmi, V. A., Astutik, L. B., & Hasanah, W. (2024). Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Moneter. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 58–61.
- Muljawan, D., Suseno, P., & Purwanta, W. (2020). *Ekonomi Syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Graha Ilmu.
- Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>
- R. Sari, & A.Y, L. (2024). Efektivitas kebijakan moneter syariah terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1070>
- Rahmad Riho Zeen, Ihsan Alfi Lubis, Fitra Ilham Ramadhan, Hilman Hanif, & Khairina Tambunan. (2022). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 259–269. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.624>

- Rezeki, A., & Mahalli, K. (2014). Analisis Ekspektasi Inflasi Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(8). <https://media.neliti.com/media/publications/14753-ID-analisis-ekspektasi-inflasi-di-sumatera-utara.pdf>
- Sudarsono, H. (2017). Analisis efektivitas transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dalam mempengaruhi tingkat inflasi. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss2.art1>
- Syafitri, A., Harahap, F. A., & Syahputri, M. (2024). Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Indonesia. *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(6), 318–326.
- Syalsabila, A., Rahmawati, Y., Gustiana, L., Ferdiansyah, I., & Sufarhan, A. (2025). *Ekonomi Moneter Syariah*. Widina Media Utama.
- TetiK, M., & Bari, B. (2022). Reaction of Monetary policy to Cost-Push Inflation in Turkey: A Leaning against Wind? *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 17(1), 256–271. <https://doi.org/10.17153/oguiibf.992149>
- Wibowo, A. (2020). *Pengantar Ekonomi Makro*. Yayasan Prima Agus Teknik. <https://share.google/wYlWo2DLKp9SxaoWA>